

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Darmono & Santoso, A.B. Akta dan Sertifikat Tanah: Hukum dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2023.

Effendi, B. *Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2018.

Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. Jakarta: PT. Sekretariat Negara, 2020.

Maria S.W. Sumardjono. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

Marzuki, 'Metodologi Riset', (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2021), Hlm. 4.

Mochtar Kusumaatmadja. Hukum Nasional Indonesia dan Pembaharuan Hukum. Bandung: Alumni, 2020.

Muladi. Hukum Tanah Nasional Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Sihombing, M. Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Simanjuntak, P. Hukum Pertanahan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Subekti & Tjitrosudibio, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2021.

Sudikno Mertokusumo. Ilmu Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Suteki W. & Suharsono, A. Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.

Sudikno Mertokusumo. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Sumardjono, M. S. W. . *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.2023.

Wicaksono, T. (2021). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2022.

Wirawan, I.G.N. *Hukum Agraria dan Tata Ruang di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press, 2023.

B. Jurnal

Agustiwi, S. H. (2023). Hukum dan kebijakan hukum agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum*.

Amry, A. P., Yuhelson, Y., & Hutomo, P. (2025). Kepastian hukum Hak guna bangunan yang telah berakhir terkait sengketa pewarisan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*.

Arba, (2021). "Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

Elsura, A. H., & Lubis, S. D. (2024). Peralihan HAK GUNA BANGUNAN menjadi hak milik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/2021. Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*.

Hidayat, S., Lailiyah, M. R., & Nurdiansyah, R. (2025). Analisis keabsahan sertifikat Hak guna bangunan yang terbit di atas laut. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*.

Laksono, M. A., Winarno, R., & Istijab, I. (2023). Tinjauan yuridis proses peralihan HAK GUNA BANGUNAN menjadi hak milik. Yuriyaya: *Jurnal Ilmiah Hukum*.

Nurhasan, M. (2022). "Reforma Agraria sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik Agraria Struktural di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Rahayu, A. P., Junaidi, A., Fatmawati, I., & Lailiyah, M. R. (2024). Penyelesaian sengketa sertifikat ganda kepemilikan hak atas tanah. *Jurnal Ruang Hukum*.

- Septiady, T. (2025). Kepastian hukum pemegang Hak guna bangunan terhadap bidang tanah kosong. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.
- Sihite, S., & Widjaja, G. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tata cara perpanjangan Hak guna bangunan atas tanah negara di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*.
- Sidabutar, B. (2025). Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah menurut sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*.
- Tanthowi, I., Herlindah, H., & Supriyadi, S. (2024). Kepastian hukum peningkatan HAK GUNA BANGUNAN menjadi hak milik rumah toko atau kantor. Begawan Abioso.
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. *Tunas Agraria*.
- Vidianti, F. (2024). Pembebanan hak tanggungan pada Hak guna bangunan atas tanah hak milik. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*.
- Yusuf, M. M., & Erlina. (2025). Kedudukan akta pemberian HAK GUNA BANGUNAN/Hak Pakai atas hak milik yang dibatalkan administratif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.

C. Skripsi

- Elisa Suraya Putri, “Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Lahan Pt.Perkebunan Nusantara Oleh Masyarakat Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang,” 2023.
- Muhammad Nabil, “Keabsahan Peralihan Shm Menjadi Sertifikat Hak guna bangunan Dan Hak Pakai Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 (Studi Putusan Nomor 114/G/2016/Ptun-Jkt),” 2023.

D.Undang- Undang

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah